E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4989-4998
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Peran Manajemen Pendidikan Nonformal dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah di Indonesia

Ocha Ilvi Kamalia[1], Rangga Naim Ansori[2], Aisyah Lailatul Isnaini[3], Aril Maulana[4] ,Indah Prabawati[5] , Wilda Sumarsyah[6]

[1,2,3,4,5,6] Program Studi S1 Ilmu Administasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: 24040674315@mhs.unesa.ac.id 24040674325@mhs.unesa.ac.id, 24040674335@mhs.unesa.ac.id, 24040674337@mhs.unesa.ac.id
indahprabawati@unesa.ac.id, wildasumarsyah@unesa.ac.id

Abstract

School dropout remains a challenge for education in Indonesia, particularly at the secondary level and among low-expenditure households. Nonformal education, through the equivalency programs Package A, Package B, and Package C, offers an alternative pathway, but the existence of a program alone does not guarantee results without proper management. This study aims to describe the role of nonformal education management in reducing school dropout, to analyze the application of the planning, organizing, actuating, and controlling functions, and to identify supporting and inhibiting factors. The study uses a descriptive qualitative approach with a literature study of scientific journal articles, books, regulations, and official institutional reports, analyzed through data reduction, categorization, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that nonformal education management plays preventive, curative, skills development, and coordinative roles. These roles can be realized when the four management functions are carried out in an integrated and sustained manner, from target mapping, task division and partnership networks, and flexible learning to monitoring and evaluation. Supporting factors include flexible learning, tutor commitment, and support from the government and the community, while inhibiting factors include limited budgets, insufficient numbers and competence of tutors, difficult access, and weak coordination and monitoring. The available data do not directly prove the effect of nonformal education on reducing dropout rates. Nonformal education has the potential to help reduce school dropout, but it is not the only solution and requires cross-sector collaboration.

Keywords: Nonformal Education Management, School Dropout, Equivalency Education, POAC, Community Learning Centers

Abstrak

Angka putus sekolah masih menjadi tantangan pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang menengah dan pada kelompok keluarga berpengeluaran rendah. Pendidikan nonformal melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C menyediakan jalur alternatif, tetapi keberadaan program saja belum menjamin hasil yang diharapkan tanpa pengelolaan yang tepat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran manajemen pendidikan nonformal dalam mengurangi angka putus sekolah, menganalisis penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan terhadap artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga resmi, yang dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan nonformal berperan secara preventif, kuratif, pengembangan keterampilan, dan koordinatif. Peran tersebut dapat terwujud apabila keempat fungsi

manajemen dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari pemetaan sasaran, pembagian tugas dan jejaring kerja sama, pembelajaran yang fleksibel, hingga pemantauan dan evaluasi. Faktor pendukung meliputi fleksibilitas belajar, komitmen tutor, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, sedangkan hambatannya mencakup keterbatasan anggaran, jumlah dan kompetensi tutor, akses, serta lemahnya koordinasi dan pemantauan. Data yang tersedia belum membuktikan secara langsung dampak pendidikan nonformal terhadap penurunan angka putus sekolah. Pendidikan nonformal berpotensi membantu mengurangi putus sekolah, tetapi bukan satu-satunya solusi sehingga memerlukan kerja sama lintas sektor.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan Nonformal, Putus Sekolah, Pendidikan Kesetaraan, POAC, PKBM

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting dalam membekali seseorang dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Namun, masih ada anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya, sehingga kesempatan belajar belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Alifa, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 9 dari setiap 1.000 siswa SD/sederajat, 12 dari setiap 1.000 siswa SMP/sederajat, dan 16 dari setiap 1.000 siswa SMA/sederajat mengalami putus sekolah. Tingkat penyelesaian pendidikan juga menurun pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu 97,84% pada SD/sederajat, 91,15% pada SMP/sederajat, dan hanya 67,07% pada SMA/sederajat.

Kondisi ekonomi keluarga turut berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah pada jenjang SMA/sederajat mencapai 30,66% pada kelompok pengeluaran 20% terbawah, sedangkan pada kelompok pengeluaran 20% teratas angkanya 14,67%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masih memengaruhi kesempatan anak memperoleh pendidikan. Persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal juga dapat berkaitan dengan jumlah anak yang putus sekolah (Tubu et al., 2021).

Dalam situasi tersebut, pendidikan nonformal dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang mengalami hambatan mengikuti pendidikan formal. Salah satu bentuknya adalah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang tetap membuka layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Sejumlah penelitian telah mengkaji peran pendidikan nonformal dalam mengurangi putus sekolah, baik di wilayah perdesaan (Imaniar et al., 2025) maupun melalui Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Surabaya (Priambodo et al., 2022). Kajian lain menyoroti pengelolaan program pendidikan kesetaraan, seperti Paket B (Bainkabel et al., 2026) dan Paket C (Nurhayani et al., 2025), serta efektivitas pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Lausa et al., 2024).

Keberadaan program pendidikan nonformal belum tentu berjalan baik tanpa pengelolaan yang tepat. Manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Faiz et al., 2024) dibutuhkan agar lembaga dapat menentukan sasaran peserta didik, menyesuaikan kegiatan pembelajaran, menyediakan tutor, dan mengevaluasi program. Meskipun demikian, penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam upaya menekan angka putus sekolah masih perlu dijelaskan secara lebih terpadu. Kesenjangan inilah yang hendak dijawab artikel ini melalui sintesis literatur.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran manajemen pendidikan nonformal dalam mengurangi angka putus sekolah, mengkaji penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada program pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya. Hasil kajian diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan nonformal serta menjadi bahan

pertimbangan bagi lembaga penyelenggara, pemerintah dan dinas pendidikan, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam peran manajemen pendidikan nonformal dalam mengurangi angka putus sekolah. Karena data bersumber dari literatur, penelitian dilaksanakan sebagai studi kepustakaan (*documentary study*) yang menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan nonformal serta kontribusinya terhadap upaya mengurangi angka putus sekolah.

Sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang membahas pendidikan nonformal atau penanggulangan angka putus sekolah. Sumber data sekunder berupa buku teks, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan turunannya, laporan resmi lembaga pemerintah dan internasional seperti Kementerian Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan UNESCO, serta artikel dan publikasi lain yang memperkaya pembahasan.

Pengumpulan, Analisis, dan Keabsahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Peneliti menentukan kata kunci, antara lain “manajemen pendidikan nonformal”, “putus sekolah”, “pendidikan kesetaraan”, *nonformal education management*, dan *school dropout*, lalu menelusuri basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, Sinta, ERIC, dan ScienceDirect. Literatur diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevansi topik, rentang tahun terbit (misalnya sepuluh tahun terakhir), serta status jurnal yang terindeks atau terakreditasi. Literatur yang tidak relevan, tidak dapat diakses teks lengkapnya, atau berasal dari sumber yang tidak tepercaya dikeluarkan. Literatur terpilih dikelola dengan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero dan dicatat dalam tabel sintesis yang memuat identitas sumber, tujuan, metode, dan temuan utama.

Data dianalisis dengan teknik analisis isi melalui empat tahap. Reduksi data memilih dan merangkum literatur sesuai fokus penelitian. Kategorisasi mengelompokkan temuan ke dalam tema, misalnya berdasarkan fungsi manajemen atau faktor penyebab putus sekolah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel sintesis, atau bagan agar pola dan hubungan antartema terlihat jelas. Tahap terakhir adalah sintesis dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, disertai identifikasi kesenjangan penelitian sebagai rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

Keabsahan data dijaga melalui empat teknik. Triangulasi sumber membandingkan temuan dari literatur dengan latar belakang penulis, tahun, dan konteks yang berbeda untuk melihat konsistensi maupun perbedaannya. Verifikasi kredibilitas memastikan sumber berasal dari jurnal terakreditasi atau terindeks (Sinta, Scopus, atau setara), penerbit bereputasi, atau lembaga resmi. Pengecekan kemutakhiran mengutamakan literatur yang relatif baru dengan tetap mempertimbangkan literatur klasik untuk konsep dasar. Terakhir, *audit trail* mendokumentasikan proses pencarian, penyeleksian, dan analisis secara transparan sehingga dapat ditelusuri ulang oleh pihak lain.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Masalah Putus Sekolah

Putus sekolah (*dropout*) adalah keadaan ketika peserta didik berhenti mengikuti pembelajaran pada suatu jenjang sebelum menamatkannya, baik karena kemauan sendiri maupun karena keadaan yang memaksa. Indikator ini penting untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan dengan angka partisipasi pendidikan dan indeks pembangunan manusia. Persoalan ini perlu dilihat sebagai masalah akses sekaligus keberlanjutan belajar. Istilah anak tidak sekolah (ATS) mencakup anak yang belum pernah bersekolah, berhenti sebelum menuntaskan jenjang, atau lulus dari satu jenjang tetapi tidak melanjutkan. Estimasi UNICEF berdasarkan Susenas 2022 menunjukkan bahwa sekitar 4,1

juta anak usia 7–18 tahun, atau 7,6% dari populasi usia tersebut, berada di luar sekolah (GoodStats Data, 2025). Dari kelompok ATS itu, 43% berhenti sebelum menyelesaikan jenjang, sedangkan 51% menyelesaikan satu jenjang tetapi tidak melanjutkan. Karena itu, upaya mengurangi putus sekolah juga perlu mencegah anak berhenti pada peralihan ke jenjang berikutnya.

Angka putus sekolah tahunan dan estimasi ATS tidak dapat dibandingkan secara langsung. Menurut indikator tahunan dari publikasi BPS yang dikutip GoodStats, pada tahun ajaran 2023/2024 angka putus sekolah tercatat 0,19% untuk SD, 0,18% untuk SMP, 0,19% untuk SMA, dan 0,28% untuk SMK (GoodStats Data, 2025). Dibandingkan tahun ajaran 2022/2023, angka untuk SD, SMP, dan SMK meningkat, sedangkan angka SMA sedikit menurun. Angka tersebut hanya mengukur siswa yang berhenti sebelum menamatkan jenjangnya, sementara angka ATS UNICEF juga mencakup anak yang belum pernah bersekolah dan yang tidak melanjutkan pendidikan, dengan tahun rujukan dan penyebut yang berbeda. Tabel 1 menyajikan indikator BPS tahun 2024 menurut jenjang. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah ini masih perlu ditangani, tetapi tidak membuktikan secara langsung bahwa pendidikan nonformal telah menurunkan atau menaikkan angka putus sekolah.

Tabel 1. Indikator Putus Sekolah dan Penyelesaian Pendidikan menurut Jenjang (BPS, 2024)

Jenjang	Putus sekolah per 1.000 siswa	Tingkat penyelesaian (%)
SD/sederajat	9	97,84
SMP/sederajat	12	91,15
SMA/sederajat	16	67,07

Penyebab putus sekolah bersifat majemuk (Alifa, 2023; Tubu et al., 2021). Faktor ekonomi berupa keterbatasan kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak. Faktor sosial budaya mencakup pandangan masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan formal, pernikahan usia dini, dan norma adat tertentu. Faktor psikologis berupa rendahnya motivasi dan minat belajar, sedangkan faktor keluarga meliputi keharusan membantu perekonomian keluarga, perceraian orang tua, atau kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak. Faktor sekolah mencakup jarak tempuh yang jauh, layanan yang kurang memadai, dan lingkungan yang kurang kondusif, sementara faktor geografis terutama dialami anak di wilayah terpencil yang sulit dijangkau transportasi.

Dampak putus sekolah dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Bagi individu, putus sekolah membatasi kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga menurunkan peluang memperoleh pekerjaan yang layak. Bagi masyarakat, tingginya angka putus sekolah dapat berkontribusi pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Konsep dan Fungsi Manajemen Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sekaligus sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat (Mildawati & Tangngareng, 2023). Pendidikan nonformal juga digambarkan tidak terikat ketat pada kurikulum baku, waktu, dan lokasi. Karakter tersebut tampak pada program kesetaraan, yakni Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, yang dirancang fleksibel dalam waktu, tempat, dan metode sehingga dapat menjangkau peserta didik dengan latar belakang beragam.

Manajemen pendidikan nonformal (PNF) menyelenggarakan layanan alternatif yang fleksibel, adaptif, dan inklusif bagi anak yang tidak terakomodasi dalam sistem persekolahan formal maupun yang telah putus sekolah. Melalui tata kelola yang terstruktur, PNF dapat mengatasi hambatan geografis dan ekonomi serta membuka kesempatan belajar bagi ATS. Perannya tidak sebatas menyediakan kelas atau program kesetaraan, tetapi juga mencakup penetapan sasaran peserta didik, pengelolaan sumber daya, pendampingan pembelajaran, dan evaluasi keberlanjutan belajar. Karena itu, keberadaan program saja tidak cukup; program perlu dikelola agar selaras dengan kondisi peserta didik dan tujuan pendidikan. Peran tersebut dapat dikelompokkan menjadi peran preventif, kuratif, pengembangan keterampilan, dan koordinatif.

Peran Preventif, Kuratif, Pengembangan Keterampilan, dan Koordinatif

Peran preventif berupaya mencegah anak yang masih bersekolah keluar dari sistem pendidikan sebelum waktunya. Manajemen PNF menjalankannya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua dan anak berisiko tinggi putus sekolah, yang direncanakan pengelola PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bersama pemerintah desa atau kelurahan dan tokoh masyarakat. Upaya ini mencakup deteksi dini terhadap faktor risiko, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung, sehingga intervensi dapat diberikan sebelum anak meninggalkan sekolah. Pencegahan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan merekrut kembali anak yang sudah putus sekolah.

Peran kuratif adalah pemulihan bagi anak yang sudah putus sekolah, ketika pendidikan nonformal menjadi rumah kedua yang menyambut mereka kembali. Program Paket A, B, dan C menjadi sarana utamanya: anak yang putus sekolah di tingkat SD dapat mengikuti Paket A untuk memperoleh ijazah setara SD, yang berhenti di tingkat SMP dapat mengikuti Paket B, dan yang putus di tingkat SMA dapat mengikuti Paket C. Program ini menawarkan waktu, biaya, dan metode yang lebih fleksibel sehingga anak yang merasa gagal di sekolah formal dapat membangun kembali kepercayaan diri untuk belajar. PKBM berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka putus sekolah melalui peran kuratif, yakni menjangkau anak yang telah putus sekolah dan memulihkan hak mereka atas pendidikan. Peran ini penting karena anak putus sekolah sering sulit kembali ke pendidikan formal akibat faktor psikologis seperti rasa malu dan rendah diri, serta kendala administratif seperti usia yang telah melampaui batas, sedangkan pendidikan nonformal menawarkan solusi inklusif tanpa diskriminasi usia.

Peran pengembangan keterampilan menjadi salah satu hal yang paling membedakan pendidikan nonformal dari pendidikan formal. Jika pendidikan formal lebih berfokus pada aspek akademik dan kognitif, pendidikan nonformal memberi perhatian lebih besar pada pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) dan keterampilan vokasional yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Di PKBM dan SKB, peserta didik mempelajari keterampilan fungsional seperti tata boga, tata busana, elektro, pertanian, perbengkelan, dan teknologi informasi melalui praktik langsung, sehingga memperoleh kemampuan yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi diri sendiri dan keluarga. Hal ini penting karena faktor ekonomi merupakan penyebab yang dominan pada putus sekolah di Indonesia (Alifa, 2023). Ketika anak putus sekolah memperoleh keterampilan lalu bekerja atau membuka usaha, penghasilannya dapat membantu keluarga sehingga adik-adik atau anak lain di lingkungannya mungkin tidak perlu putus sekolah karena kendala biaya. Dengan demikian, pengembangan keterampilan dapat membantu memutus rantai kemiskinan yang menjadi salah satu akar masalah putus sekolah.

Peran koordinatif merupakan fungsi integratif yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menekan angka putus sekolah. Pengelola PNF menyelaraskan tujuan, kebijakan, dan sumber daya pemerintah, satuan pendidikan, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga peserta didik. Koordinasi yang baik membantu setiap pihak memahami tanggung jawabnya sehingga program tidak tumpang tindih dan anak yang berisiko atau telah putus sekolah tidak mengalami kesenjangan layanan. Pendidikan nonformal tidak dapat mengatasi persoalan putus sekolah yang kompleks dan multidimensi secara mandiri; diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pendataan peserta didik dan

penyediaan layanan belajar alternatif hingga pendampingan dan penguatan keterampilan hidup (Yanto, 2026). Kolaborasi yang terkoordinasi membantu mengoptimalkan sumber daya, menjaga keberlanjutan program, dan memastikan peserta didik memperoleh dukungan menyeluruh untuk kembali belajar serta mengembangkan potensinya.

Penerapan Fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan

Manajemen umumnya dipahami sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) atau POAC dalam pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam bidang pendidikan, proses ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, pendanaan, kurikulum, serta interaksi dengan masyarakat (Faiz et al., 2024). Keempat fungsi saling berkaitan dalam satu siklus (Gambar 1): setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya, dan hasil evaluasi digunakan untuk menyusun perencanaan selanjutnya. Penerapan POAC pada program bagi anak putus sekolah memiliki tantangan tersendiri karena peserta didik beragam dalam usia, kemampuan, alasan putus sekolah, dan latar belakang sosial ekonomi, sedangkan pendanaan, tenaga pendidik, sarana, dan waktu belajar sering terbatas. Karena itu, pengelola perlu bersikap fleksibel dan kreatif.

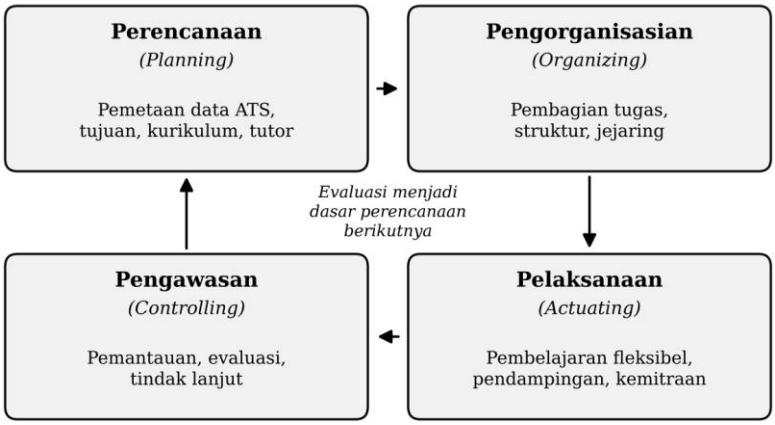

Gambar 1. Siklus Fungsi Manajemen (POAC) pada Pendidikan Nonformal

Perencanaan pada PNF mencakup identifikasi kebutuhan belajar anak dan remaja putus sekolah, penetapan tujuan program, penyusunan kurikulum kontekstual, serta perencanaan sumber daya seperti tutor, sarana pembelajaran, dan pembiayaan. Perencanaan juga mengarahkan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan sekaligus menjadi dasar bagi tahap manajemen berikutnya (Mustangin et al., 2021). Pada lembaga yang menangani anak putus sekolah terlihat tiga pola. Pertama, perencanaan berbasis kebutuhan komunitas, yang diterapkan PKBM Bina Cipta melalui pendekatan partisipatif dan penggunaan data dari Dashboard ATS. Kedua, perencanaan operasional yang mencakup tujuan program, jadwal pembelajaran, pembagian tugas tutor, dan persiapan kebutuhan belajar, sebagaimana ditemukan pada program Paket B di SPNF SKB Wilayah 1 Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bainkabel et al., 2026). Ketiga, perencanaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan tutor yang berkualitas. Perencanaan diawali pemetaan data sasaran, ketika pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan UPT SKB mengidentifikasi anak usia sekolah yang tidak terdaftar di pendidikan formal. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024) tahun 2023/2024 mencatat jumlah siswa putus sekolah jenjang SD dalam sistem data pokok pendidikan, dan data tersebut menjadi dasar perencanaan intervensi.

Pengorganisasian menerjemahkan rencana ke dalam pembagian kerja dan tanggung jawab agar pengurus menjalankan tugas sesuai wewenangnya dan pembelajaran berlangsung sesuai ketentuan (Almaidah, 2017). PKBM dan SKB menjadi pelaksana utama di tingkat lokal. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas regulasi dan pendanaan, pemerintah daerah mengawasi operasional, dan lembaga nonformal melaksanakan pembelajaran. Wijiati et al. (2026) menekankan bahwa manajemen kolaboratif antara lembaga pendidikan dan

komite atau mitra sangat menentukan efektivitas program. Di tingkat lembaga, PKBM Bina Cipta menerapkan struktur organisasi fungsional dengan rasio tutor terhadap peserta didik 1:20, sedangkan PKBM Rawa Cinde mengorganisasikan layanan melalui Program Pembentukan Kelompok Belajar yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di tingkat kabupaten, Satgas ATS yang proaktif di setiap kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa, BP4D, DPRD, BUMN/BUMD, pihak swasta, serta TNI dan Polri. Pola ini menunjukkan bahwa pengorganisasian pendidikan nonformal memadukan struktur internal lembaga dengan jejaring eksternal, seperti pemerintah desa dan sekolah formal.

Pelaksanaan adalah tahap ketika rencana dan struktur organisasi diterapkan dalam kegiatan nyata. Pengelola berhadapan langsung dengan kondisi sosial anak putus sekolah yang membutuhkan bukan hanya akses pendidikan, tetapi juga pendekatan yang manusiawi dan fleksibel. Fungsi ini paling dirasakan warga belajar dan paling rentan menghadapi kendala operasional. Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan oleh PKBM dan SKB di seluruh Indonesia; menurut data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 12.000 PKBM di 34 provinsi dengan 1,8 juta peserta didik pendidikan kesetaraan. Salah satu ciri pelaksanaannya adalah pendekatan berbasis komunitas (*community-based education*): pembelajaran tidak harus berlangsung di kelas, tetapi dapat dilakukan di balai desa, rumah warga, masjid, atau tempat usaha yang disepakati bersama, sehingga dapat mengurangi rasa malu atau trauma terhadap lingkungan sekolah formal. Pelaksanaan yang adaptif juga memadukan berbagai cara belajar. Di PKBM Bina Cipta, pembelajaran berlangsung melalui tatap muka (40%), modul mandiri (35%), dan praktik keterampilan (25%), komposisi yang sesuai bagi anak putus sekolah yang umumnya sudah bekerja atau membantu keluarga.

Pengawasan adalah kegiatan menilai kinerja berdasarkan standar yang ditetapkan, mencakup evaluasi keberhasilan pelaksanaan, koreksi jika terjadi kesalahan, dan pemberian solusi alternatif jika muncul masalah. Unsur yang dipantau dapat meliputi keterjangkauan layanan, pendaftaran, kehadiran, retensi, kemajuan belajar, hasil asesmen, kelulusan, kelanjutan pendidikan, ketersediaan tutor dan bahan ajar, serta penggunaan anggaran. Praktik pemantauan pada program pendidikan nonformal, misalnya pada Program Indonesia Pintar, telah dikaji oleh Rasyad et al. (2021). Pemantauan sebaiknya dilakukan secara berkala dan hasilnya dibahas bersama tutor serta pengelola, termasuk untuk menindaklanjuti peserta yang berisiko putus sekolah kembali.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan

Keberhasilan pengelolaan pendidikan nonformal dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang dapat dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu akses dan desain layanan, sumber daya dan mutu, tata kelola dan dukungan, partisipasi dan penerimaan, serta inklusi. Ringkasan faktor-faktor tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pendidikan Nonformal

Aspek	Faktor pendukung	Faktor penghambat
Akses dan desain layanan	Jadwal dan moda belajar fleksibel, pendidikan kesetaraan, sertifikat, integrasi keterampilan hidup/vokasi.	Jarak dan akses yang sulit, kebutuhan bekerja, layanan belum selalu sesuai kebutuhan peserta.
Sumber daya dan mutu	Komitmen tutor, kemitraan lokal, fasilitas dan kontribusi masyarakat dapat memperkuat layanan.	Kekurangan tutor, kualifikasi atau penguasaan materi yang kurang sesuai, pelatihan terbatas, dan anggaran operasional minim.
Tata kelola dan dukungan	Pembagian peran yang jelas, dukungan pemerintah daerah/desa, jejaring PKBM–SKB, serta pendataan ATS membantu koordinasi.	Koordinasi lintas pihak dan kapasitas monitoring belum memadai; sebagian besar PKBM belum terakreditasi dan dana subsidi belum menutup seluruh biaya operasional.

Aspek	Faktor pendukung	Faktor penghambat
Partisipasi dan penerimaan	Keterlibatan warga dalam tenaga, tempat, dana, ide, motivasi, dan pengawasan memperkuat rasa memiliki.	Kesibukan pekerjaan, partisipasi yang lemah, persoalan pengurus, serta keterbatasan dana dapat menghambat dukungan komunitas.
Inklusi	Fleksibilitas dapat menjadi pilihan yang sesuai bagi sebagian anak perempuan dan peserta dengan kondisi belajar tertentu.	Fasilitas dan kapasitas pendidik untuk disabilitas terbatas, kebutuhan gender dan inklusi belum selalu terakomodasi.

Pada aspek akses dan desain layanan, fleksibilitas jadwal dan moda belajar, sertifikat pendidikan kesetaraan, dan integrasi keterampilan hidup menjadi kekuatan, tetapi jarak, kebutuhan bekerja, dan layanan yang belum sesuai kebutuhan masih menghambat. Dari sisi sumber daya, komitmen tutor dan kontribusi masyarakat memperkuat layanan, sedangkan kekurangan tutor, kompetensi yang belum sesuai, pelatihan yang terbatas, dan anggaran operasional yang minim menjadi kendala. Pada tata kelola, pembagian peran yang jelas, dukungan pemerintah daerah atau desa, dan pendataan ATS membantu koordinasi, namun sebagian besar PKBM belum terakreditasi dan dana subsidi belum menutup seluruh biaya operasional. Pada aspek partisipasi, keterlibatan warga memperkuat rasa memiliki, tetapi kesibukan pekerjaan dan keterbatasan dana dapat melemahkannya. Pada aspek inklusi, fleksibilitas sesuai bagi sebagian anak perempuan dan peserta dengan kondisi belajar tertentu, tetapi fasilitas dan kapasitas pendidik untuk penyandang disabilitas masih terbatas.

Sintesis dan Implikasi Kebijakan

Pembahasan menunjukkan tiga hal. Pertama, pendidikan nonformal berpotensi mengurangi angka putus sekolah melalui upaya pencegahan, penanganan, pengembangan keterampilan, dan koordinasi. Kedua, potensi ini dapat terwujud jika fungsi POAC dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan. Ketiga, keberhasilan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang sebagian besar dapat dikelola dengan manajemen yang baik. Perlu dicatat bahwa data yang tersedia tidak membuktikan secara langsung bahwa pendidikan nonformal telah menurunkan angka putus sekolah, sehingga temuan ini menggambarkan potensi dan syarat keberhasilannya.

Dari sisi kebijakan, penguatan pendidikan nonformal perlu mencakup pendataan anak putus sekolah, peningkatan kompetensi tutor, dukungan pembiayaan, serta kerja sama lintas sektor. Pendataan yang baik, misalnya melalui dashboard ATS, memungkinkan perencanaan menjangkau sasaran yang tepat. Peningkatan kompetensi tutor dan dukungan pembiayaan menjawab hambatan pada mutu dan sumber daya, sedangkan kerja sama lintas sektor memperkuat koordinasi dan keberlanjutan program.

KESIMPULAN

Pendidikan nonformal menjadi jalur alternatif sekaligus pendukung bagi anak yang berisiko putus sekolah atau sudah mengalaminya. Perannya meliputi pencegahan melalui sosialisasi dan deteksi dini, pemulihan akses belajar melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C, pengembangan keterampilan hidup, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan agar peserta didik mendapat dukungan yang lebih menyeluruh. Fungsi POAC saling melengkapi: perencanaan memetakan kebutuhan dan sasaran, pengorganisasian mengatur pembagian tugas dan sumber daya, pelaksanaan menyediakan layanan belajar yang fleksibel, dan pengawasan menilai kemajuan serta memperbaiki program. Karena itu, keberadaan program saja tidak cukup; pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan menentukan sejauh mana program menjangkau peserta didik. Keberhasilan program didukung oleh pembelajaran yang fleksibel, komitmen tutor, kemitraan dan partisipasi masyarakat, pembagian peran yang jelas, serta dukungan pemerintah. Pelaksanaannya terhambat oleh anggaran terbatas, jumlah atau kompetensi tutor yang kurang memadai, sulitnya akses, jadwal yang belum sesuai kebutuhan peserta, serta koordinasi dan pemantauan yang lemah. Pendidikan nonformal berpotensi membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi bukan satu-satunya solusi bagi

masalah yang berpenyebab banyak, sehingga upayanya perlu disesuaikan dengan faktor yang dialami setiap peserta didik dan didukung kerja sama lintas sektor, termasuk keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Pengelola PKBM dan SKB disarankan menyusun program berdasarkan data anak tidak sekolah dan pemetaan kebutuhan belajar, menyesuaikan jadwal, metode, dan lokasi pembelajaran, serta menetapkan pembagian tugas yang jelas bagi pengelola, tutor, dan mitra. Tutor dan tenaga kependidikan perlu meningkatkan kompetensi secara berkala, menerapkan pembelajaran inklusif dan kontekstual, serta mendampingi peserta yang berisiko tidak aktif atau berhenti belajar kembali. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat dukungan pembiayaan dan sarana, membantu peningkatan kapasitas tutor, dan mengembangkan koordinasi pendataan serta rujukan anak tidak sekolah bersama pemerintah desa, sekolah, PKBM/SKB, dan lembaga terkait. Masyarakat dan keluarga diharapkan mendukung keberlanjutan pendidikan anak dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan nonformal ketika anak menghadapi hambatan belajar. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan yang melibatkan peserta didik, keluarga, tutor, pengelola, dan pemangku kebijakan, serta menggunakan indikator yang jelas seperti kehadiran, keberlanjutan belajar, penyelesaian program, dan transisi ke jenjang berikutnya agar kontribusi program dapat dinilai lebih terukur.

DAFTAR PIUSTAKA

Alifa, V. N. (2023). Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah Di Indonesia Pada Tahun 2022. Jurnal Pendidikan Sultan Agung, 3(2), 175–182. Https://Doi.Org/10.30659/Jp-Sa.3.2.175-182

Almaidah, S. (2017). Analisis Efektivitas Kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat. Media Ekonomi Dan Manajemen, 32(2). Https://Doi.Org/10.24856/Mem.V32i2.541

Bainkabel, D. V., Neonufa, S., & Famdale, R. Y. (2026). Analisis Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Di Satuan Pendidikan Non Formal (Spnf) Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Wilayah 1 Kabupaten Timor Tengah Selatan. Diajar: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(3), 1266–1274. Https://Doi.Org/10.54259/Diajar.V5i3.8156

Faiz, M., Suciamy, R., Zaskia, S., & Kusumaningrum, H. (2024). Implementasi Poac Dalam Manajemen Pendidikan Modern. Reflection: Islamic Education Journal, 1(4), 26–36. Https://Doi.Org/10.61132/Reflection.V1i4.157

Goodstats Data. (2025, January 31). Angka Anak Tidak Sekolah Di Indonesia Masih Tinggi. Goodstats Data. Https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Angka-Anak-Tidak-Sekolah-Di-Indonesia-Masih-Tinggiu3t1l

Imaniar, M., Nurhidayatika, N., & Roswati, R. (2025). Peran Pendidikan Non Formal Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah Di Wilayah Pedesaan. Diksi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial, 6(2), 77–84. Https://Doi.Org/10.53299/Diksi.V6i2.1570

Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. (2024). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2023/2024. Portal Data Kemendikdasmen. Https://Data.Kemendikdasmen.Go.Id/Publikasi/P/Pauddasmen-Buku-Statistik/Ikhtisar-Data-Pendidikan-Tahun-2023-2024

Lausa, F. J. L. D., Rahman, A., Puspitasari, S. W., & Abdurochman, A. (2024). Increasing Management Effectiveness Of Non-Formal Education Management In Community Learning Activity Centers. Jurnal Pendidikan Nonformal, 19(1), 55. Https://Doi.Org/10.17977/Um041v19i12024p55-68

Mildawati, T., & Tangngareng, T. (2023). Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam. Vifada Journal Of Education, 1(2), 01–28. Https://Doi.Org/10.70184/W33a8b87

Mustangin, M., Iqbal, M., & Buhari, M. R. (2021). Proses Perencanaan Pendidikan Nonformal Untuk Peningkatan Kapasitas Teknologi Pelaku Umkm. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 5(3), 414. Https://Doi.Org/10.23887/Jppp.V5i3.38927

Nurhayani, N., Rohmah, S., & W, D. F. K. (2025). Efektivitas Manajemen Pendidikan Kesetaraan Paket C. Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan, 4(4), 2340–2352. Https://Doi.Org/10.56916/Ejip.V4i4.2086

Priambodo, B., Reviandani, O., & Nirawati, L. (2022). Implementation Of Sanggar Kegiatan Belajar To Reduce The School Dropout Rate In The City Of Surabaya. Jurnal Ad'ministrare, 9(2), 397. Https://Doi.Org/10.26858/Ja.V9i2.36995

Rasyad, A., Ahmad, & Sari, R. P. (2021). Smart Indonesia Program Monitoring In Non-Formal Education. In Advances In Social Science, Education And Humanities Research. Https://Doi.Org/10.2991/Assehr.K.211210.009

Tubu, B., Malik, A., & Syarif, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Formal Kaitannya Dengan Jumlah Anak-Anak Putus Sekolah. Lageografia, 19(3), 316. Https://Doi.Org/10.35580/Lageografia.V19i3.20526

Wijiati, L., Haryaka, U., Mulawarman, W. G., Komariyah, L., Nurlaili, N., & Azainil, A. (2026). Collaborative Management Between School Principals And Committees In Improving The Quality Of Education. Journal Of Educational Sciences. Https://Doi.Org/10.31258/Jes.10.7.P.826-846

Yanto, Y. (2026). Integrated Policy Strategies For Addressing Out-Of-School Children (Osc) In Metro City. Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 4(3), 2179–2212. Https://Doi.Org/10.61860/Jigp.V4i3.354